



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2017/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : ANGGOTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NINIK RAHAYU**
2. Jabatan : **ANGGOTA OMBUDSMAN RI**
3. NHK : **472505**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.500.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m <sup>2</sup> /200 m <sup>2</sup> di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m <sup>2</sup> /300 m <sup>2</sup> di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m <sup>2</sup> /200 m <sup>2</sup> di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
4. Bangunan Seluas 97 m <sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>281.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.863.121</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.890.023.070</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>125.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.815.886.191</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.815.886.191</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhnya kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.